

Pelaksanaan Program Strategi Pengembangan UMKM pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang

Sutinah Andaryani¹, Irrayana²

¹ Ilmu Administrasi Negara, STIA & P ADS - Jl. Puncak Sekuning No. 170 Palembang

² Ilmu Administrasi Negara, STIA & P ADS - Jl. Puncak Sekuning No. 170 Palembang

E-mail: nanaberliandt@gmail.com

ABSTRAK

Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Strategi Pengembangan UMKM Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian yaitu terdapatnya Informasi Terpadu, yang dapat memudahkan masyarakat untuk behubungan dengan pemerintah seperti terkait dengan proses perizinan dan perkembangan UKM nya melalui website <https://hallo.palembang.go.id> dan <https://lapor.go.id>. Selanjutnya tersedianya Pusat Konsultasi Dan Pengembangan UMKM, yang berkerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang, namun masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya dalam memperoleh aspirasi masyarakat terkait dengan perkembangan usaha di Kota Palembang dengan mendirikan perkumpulan melalui MUSRENBANG dari tingkat kelurahan dan kecamatan sehingga dapat memilih prioritas kegiatan yang akan diprioritaskan sesuai dengan potensi kondisi wilayah per-kecamatan. Terdapatnya Sistem Pemasaran Bersama, dengan menciptakan Forum dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) yang ada di Kota Palembang, forum ini menampung semua hasil produksi UKM di Kota Palembang. Selain Forum tersebut, Daerah yang menyediakan pemasaran bersama melalui Pameran Tingkat Local Dan Regional yang diadakan setahun sekali yaitu tepatnya pada hari jadi Kota Palembang dan hari jadi Provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci : Pelaksanaan, Program, Strategi, Pengembangan, UMKM

ABSTRACT

This research to find out the implementation of the MSME Development Strategy Program in the Economic Section of the Palembang City Regional Secretariat. This research is a qualitative research using a descriptive approach. Collecting data using in-depth interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out using qualitative data analysis techniques. The results of the study are the existence of Integrated Information, which can make it easier for the public to relate to the government, such as related to the licensing process and the development of SMEs through the websites <https://hallo.palembang.go.id> and <https://lapor.go.id>. Furthermore, the availability of the MSMEs Consultation and Development Center, in collaboration with the Palembang City Cooperatives and MSMEs Service, has not yet been fully utilized. Furthermore, in obtaining community aspirations related to business development in the city of Palembang by

establishing associations through MUSRENBANG from the village and sub-district levels so that they can choose priority activities to be prioritized according to the potential conditions of the per-district area. The existence of a Joint Marketing System, by creating a Forum with the Regional National Crafts Council (DEKRANASDA) in Palembang City, this forum accommodates all the products produced by SMEs in Palembang City. In addition to the Forum, the Regions provide joint marketing through Local and Regional Level Exhibitions which are held once a year, namely on the anniversary of the City of Palembang and the anniversary of the Province of South Sumatera.

Keywords: *Implementation, Program, Strategy, Development, MSME*

1. PENDAHULUAN

Perubahan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting yang merujuk pada pengembangan ekonomi dan pengembangan suatu bangsa. [1] Pemerataan pertumbuhan ekonomi lebih diutamakan dan menjadi fokus pemerintah pada era reformasi. [2] Daya saing ekonomi di daerah terus ditingkatkan yang merupakan akumulasi dari pengembangan ekonomi lokal ataupun nasional Indonesia.[3] Usaha mikro, kecil menengah (UMKM) memiliki peranan dalam melihat potensi yang ada sebagai usaha untuk mencukupi kebutuhan perekonomiannya. [4]

Pada Tahun 2018 UMKM berjumlah 1.034,64 dimana mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 2017. Kenaikan ini berada pada kategori segmen usaha mikro yang naik mencapai angka 99,99% dari total kenaikan. Selanjutnya mencapai 1.098,14 unit pada Tahun 2019. [5]

Terdapat masalah internal dan eksternal yang dialami pelaku UMKM yang cukup pelik selain itu terdapat tantangan dari pesatnya perkembangan ekonomi sendiri serta era globalisasi dan teknologi informasi. [6]

Pemerintah memiliki kewajiban untuk ambil bagian dalam memberikan

solusi atas masalah yang ada seperti akses pasar, modal dan teknologi selain mengembangkan kemitraan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusiannya.[6]

Upaya pemulihan kondisi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, Kota Palembang yang merupakan salah satu daerah otonom ada baiknya memiliki perencanaan pembangunan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga hendaknya memiliki struktur industri dan perdagangan yang kokoh dan seimbang serta berdaya saing tinggi berdasarkan pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Berbicara mengenai sumber daya alam, maka potensi alam dan usaha sandang pangan adalah peluang bagi seluruh Usaha Kecil Menengah dalam menciptakan lapangan usaha baru di Kota Palembang, serta merupakan modal dasar yang mampu mendorong pelaksanaan pengembangan agro industri dan agro bisnis yang tangguh.

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang adalah instansi Pemerintahan yang melayani masyarakat dalam sektor Pengembangan Usaha serta Pembinaan UKM yang berdasarkan pada Peraturan Walikota Kota Palembang

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli. [7]

Kehadiran bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang dinilai sangat berperan dalam menumbuh kembangkan usaha-usaha kecil menengah UKM / UMKM Kota Palembang yang merupakan pusat Kota. Andaryani memberikan gambaran bahwa pusat kota yaitu kawasan yang merupakan inti dari aktivitas pemerintahan dan ekonomi suatu kota.[8] Sehingga dalam hal ini perhatian pemerintah pada pengembangan ekonomi dapat terlihat dari perkembangan usaha yang ada pada Kota Palembang.

Tahun 2018 hingga akhir Tahun 2019 UKM Kota Palembang naik menjadi 4000. Dengan melaksanakan pembinaan dimana Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang juga memberikan pembekalan *soft skill*, keterampilan dan juga memberikan bantuan Modal sebesar Rp. 3.000.000,00 bagi para UKM yang betul - betul tidak mampu.[9]

Observasi yang penulis lakukan mendapatkan informasi mengenai kendala yang dihadapi oleh pelaku UKM yaitu sulitnya melakukan pengurusan izin usaha baik prosedur, waktu maupun biayanya. Akibatnya produk yang dihasilkan tidak mampu bersaing di pasar Internasional, hanya beredar di pasar Domestik atau lokal saja.

Selain itu sedikitnya peluang pasar serta keikutsertaan hasil produksi terhadap pameran - pameran daerah ataupun nasional yang dimotori oleh Pemerintah. UKM yang telah memiliki

kesempatan besar dalam mengikut sertakan hasil produksinya pada pameran Daerah dan Nasional antara lain Fikri Collection (Songket Bungo Intan, Songket Limar Tigo Negeri Terwelu Bertangkap, Songket Lasem, Songket Nampan Emas), Tuan Kentang (Songket Lepus Tampuk Manggis, Songket Tigo Benua, Songket Campuk Merah Tepi Pucuk Rebung, Bungo Pacar dan Jumputan), Zainal Songket (Lepus Limar Bungo Roda, Tabur Burung Kecil, Lepus Pulir, Campuk Merah Tepi Pucuk Rebung).

Pengembangan dan pengawasan UKM merupakan peran penting dan strategis yang harus dilakukan bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Sebagai *leading sector*. Secara umum, permasalahan dan tujuan yang hendak diangkat dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan Program Strategi Pengembangan UMKM Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pemilihan kebijakan bagi Pemerintah Kota Palembang melalui strategi yang ada.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pelaksanaan yang merupakan salah satu fungsi manajemen menurut Roni Angger Aditama [10], dimana terdapat suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha dalam mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha – usaha organisasi.

Hal yang serupa menurut Sarinah mengenai pengarahan, dimana pengarahan merupakan proses

implementasi atau pelaksanaan program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.[11]

Berbicara strategi, menurut David [12] dan Andrews [13], strategi merupakan alat mencapai tujuan jangka panjang. Strategi juga dapat diartikan sebagai tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan Sumber Daya Perusahaan dalam jumlah yang besar. Proses manajemen strategis menurut David [12], terdiri atas tiga tahap yaitu, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

Selanjutnya menurut Van Meter and Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai “*actions taken by public organizations in achieving the goals set out in the previous decisions*”. *These actions include efforts to turn decisions into operational actions within a certain period of time and continuing efforts to achieve major and minor changes determined by policy decisions*”. “tindakan yang diambil oleh organisasi publik dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya”. Tindakan tersebut meliputi upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu dan upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditentukan oleh keputusan kebijakan. [14]

Selain itu menurut Thomson dan Strickland, membuat strategi/proses

implementasi strategi mengandung lima tugas manajerial yang saling berkaitan yaitu [12]

1. Mengartikulasi visi stratejik dan misi bisnis
2. Merumuskan tujuan yang merupakan konversi visi stratejik menjadi kinerja spesifik yang harus dicapai oleh perusahaan
3. Menyusun strategi untuk mencapai *outcome* yang dikehendaki
4. Implementasi dan eksekusi strategi dan
5. Evaluasi dan *monitoring* kinerja dan inisiasi *corrective andjusment* terhadap arah perusahaan jangka panjang, tujuan, strategi atau eksekusi dan implementasi strategi.

Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn “*the task of implementation is to build a network that allows the achievement of public policy objectives through the activities of government agencies involving various interested parties*”. Bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan publik melalui kegiatan instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. [14]

Dua bentuk strategi pembangunan menurut Siagian [15] yang bisa ditempuh oleh Negara-negara sedang berkembang ialah modernisasi Pertanian dan Industrialisasi.

Kuncoro [13] mengungkapkan bahwa di era otonomi daerah, harus ada paradigm baru dalam membangun daerah. Daerah harus punya inisiatif, prakarsa, kemandirian dalam menyusun, merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah, asumsinya, daerah

lebih tahu tentang masalah dan potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

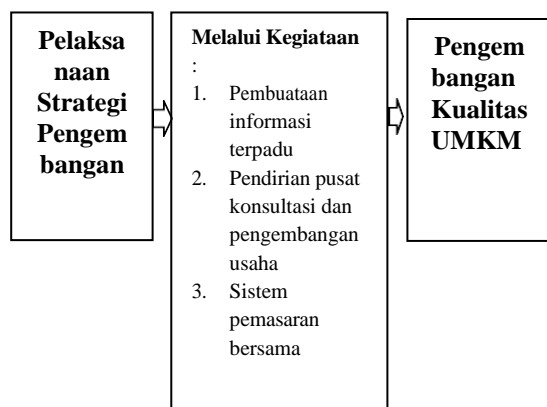
Lincoln Arsyad [3], menggambarkan strategi pembangunan ekonomi daerah menjadi :

1. Strategi pengembangan fisik (*Locality or Physical Development Strategy*)
2. Strategi pengembangan dunia usaha (*Business Development Strategy*)

Mencapai tujuan pembangunan dunia usaha tersebut diperlukan alat-alat pendukung, antara lain:

- a. Pembuatan informasi terpadu
 - b. Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil
 - c. Pembuatan sistem pemasaran bersama
 - d. Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang).
3. Strategi pengembangan sumber daya manusia (*Human Resource Development Strategy*)

Selanjutnya kerangka berfikir pada penulisan ini dilihat pada Gambar 1:



Gambar 1. Kerangka Berfikir
Sumber : diolah dari Data Sekunder

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif (*descriptive research*). Penelitian Deskriptif menurut Andaryani [16] adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan secara tepat sifat – sifat sesuatu individu, suatu keadaan, suatu gejala dan sebagainya yang merupakan obyek penelitian yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dengan jalan menganalisis, mengklasifikasi, membandingkan dan sebagainya. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah variabel mandiri yaitu pelaksanaan program.

Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu pembuatan informasi terpadu, pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha dan sistem pemasaran bersama.

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial yang akan diteliti atau dianalisis seperti misalnya aktifitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. [17] Pada penulisan ini adalah sebuah organisasi, yaitu Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: Observasi, menurut Hadi dalam Sugiyono [18] mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks. Wawancara, adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, menurut Sugiyono. [18] Studi Domentasi, dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data sekunder.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Milles dan Huberman [19], aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Selanjutnya menurut Lestari [20] “the data were set, read, and made memos, then described and interpreted according to the focus of the research then the research data was presented, and the discussion was carried out using the theory”. “Data diset, dibaca, dan dibuat memo, kemudian dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai dengan fokus riset Kemudian data penelitian disajikan, dan diskusi dilakukan menggunakan teori”. Sehingga dihasilkan temuan yang merupakan fokus pada pelaksanaan program strategi pengembangan UMKM di Kota Palembang.

4. HASIL PENELITIAN

Strategi yang digunakan dalam penulisan ini, terdiri dari beberapa indikator yaitu:

1. Pembuatan Informasi Terpadu

Strategi yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang agar pelaku UKM dan Masyarakat dengan mudah memperoleh informasi yang diinginkan dengan menyediakan *website* yang dapat diakses yang merupakan kerjasama Bagian Perekonomian dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang. *Website* yang dapat diakses pada halaman <https://hallo.palembang.go.id> dan <https://lapor.go.id> Dengan *website* ini

masyarakat dan pelaku UKM bisa mengakses dimana saja dan kapan saja untuk mendapatkan informasi dari pemerintah dan dengan menggunakan *website* ini diharapkan masyarakat juga akan lebih mudah dan terbiasa terhadap dunia teknologi.

Selain itu pemerintah dapat memberikan informasi penting dan berbagai kendala yang dialami pelaku UKM dengan mendatangi langsung tempat produksi atau pelaku UKM tersebut.

Kemudahan informasi tentu menjadi harapan bagi masyarakat sebagai penerima informasi. seperti halnya, Perizinan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dan Pemasaran Dari Hasi Produksi.

Hal ini juga mendapat respon dari pelaku UKM yang menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Bagian Perekonomian selaku pengawas hingga saat ini masih berjalan baik, namun sayangnya sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang, seperti areal tempat parkir dan ruang tunggu yang masih terbilang sempit. Selanjutnya untuk informasi yang disediakan masih kurang terdistribusi, sehingga hanya beberapa UKM saja yang memperoleh suatu informasi, terutama informasi tentang adanya pameran diluar daerah.

Sedangkan untuk papan informasi yang ada masih kurang lengkap dan tidak menyajikan informasi terbaru, hanya terdapat struktur organisasi dan visi misi. Namun dengan hal ini Bagian Perekonomian selaku pengawas dan juga Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang terus berusaha untuk

berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku UMKM

2. Pendirian Pusat Konsultasi Dan Pengembangan UMKM

Pemerintah Kota Palembang telah menyediakan pusat informasi dan konsultasi bagi pengembangan UKM. Namun untuk proses pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Pusat konsultasi yang ada jarang sekali didatangi oleh pelaku UKM untuk melakukan konsultasi, padahal selama masih menjadi binaan pemerintah hal yang menjadi permasalahan pelaku UKM harus dikonsultasikan dengan pemerintah.

Pengunjung yang datang hanya masyarakat yang ingin melakukan proses legalitas izin usahanya yang sebenarnya yang saat ini merupakan kewenangan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengeluarkan legalitas atau izin usaha.

Stategi lain yang dilakukan agar tetap dekat dengan masyarakat dilakukan pendekatan melalui partisipasi masyarakat, dimulai dengan menghimpun tingkat kelurahan sampai pada tingkat kecamatan yang dimotori oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Palembang, agar memperoleh prioritas kegiatan yang diperlukan. Hasil perolehan Musrebang masing-masing kecamatan, perlu dipilih prioritas kegiatan hasil serap aspirasi tersebut sesuai dengan potensi kondisi wilayah per-kecamatan, mengingat dari banyaknya daftar usulan kegiatan yang kemungkinan besar tidak dapat teralisasi semua.

Adapun strategi selanjutnya yaitu dengan melihat secara langsung hal yang menjadi kendala bagi pemilik usaha. Contohnya, pemilik usaha menginginkan adanya pelatihan maka pihak pemerintah akan membantu dalam pengadaan pelatih untuk memberikan pelatihan kepada pelaku UKM. Selain itu untuk membantu dalam melengkapi peralatan kerja, maka yang dilakukan Pemerintah adalah dengan memberikan bantuan berupa uang yang bisa digunakan untuk membeli peralatan. Pada pemasaran hasil produksinya pemerintah juga ikut membantu mengembangkan dengan cara melakukan kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang dan dengan mengikutsertakan mereka dalam sebuah pameran.

Terdapat kendala dalam perencanaan dan pengawasan UMKM yaitu:

- a. Terbatasnya staf dalam mendata unit usaha dan sarana pendukungnya, sehingga pendataan sebagai dasar untuk memberikan pembinaan dapat belum menjangkau lebih luas pada pengusaha kecil yang jumlahnya sangat besar dan tersebar diberbagai pelosok daerah.
- b. Tingkat kewirausahaan para pengrajin pada umumnya masih rendah, lemahnya permodalan, peralatan yang kurang memadai sehingga kurang bisa bersaing dan faktor kualitas yang banyak diabaikan.
- c. Kurangnya pengetahuan dalam pemasaran produk dan saluran pemasaran belum dapat dimanfaatkan dengan baik.

d. Persaingan antara pengusaha kecil seringkali menghambat perkembangan usaha itu sendiri.

Langkah antisipatif yang perlu diambil pada Tahun berikutnya yaitu:

- a. Pelatihan untuk staf dalam rangka pendataan industri kecil menengah sebagai pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat tepat sasaran, fleksibel dan memberikan nilai tambah terhadap kesejahteraan masyarakat kecil.
- b. Pelatihan untuk staf sehingga dapat memenuhi kebutuhan produk yang sesuai dengan selera konsumen dan meningkatkan kualitas produksi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk lokal.
- c. Pembinaan melalui study banding, bantuan stimulat dan penggunaan teknologi tepat guna.
- d. Perlu diajukan kembali program penguatan modal untuk membantu permodalan usaha industry kecil dan menengah.

Terdapat berbagai keluhan yang sering diungkap oleh para pelaku UKM yaitu modal dan pemasaran, dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang memberikan informasi tentang pinjaman modal kepada bank seperti BPR Palembang dan untuk pemasaran pemerintah menyediakan pasar lelang, promosi produk unggulan dan kerjasama Pemerintah dengan BUMD Kota Palembang.

3 Sistem Pemasaran Bersama

Adapun startegi yang dilakukan oleh yaitu dengan menyediakan forum

bagi hasil produksi di UKM yang ada. Forum tersebut yaitu DEKRANASDA, yang mampu menampung hasil produksi UKM yang merupakan binaan pemerintah kota. Selain membuka peluang kepada para pelaku UKM untuk mengikuti pameran tingkat lokal, regional dan nasional.

Sistem pemasaran usaha mikro, kecil dan menengah dalam memasarkan produknya cukup bervariasi. Hasil produksi dipasarkan melalui lingkungan sekitar, pasar tradisional, dan terus berkembang sekarang ini memasarkan lewat internet baik mempergunakan aplikasi instargram maupun facebook dan hasilnya cukup baik hingga saat ini.

5. PEMBAHASAN

Pembahasan pelaksanaan program strategi yaitu dapat dilihat dari pembuatan informasi terpadu. Perkembangan informasi terpadu memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat untuk behubungan dengan pemerintah seperti terkait dengan proses perizinan dan perkembangan UKM nya melalui program yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah.

Informasi yang diberikan dapat berupa informasi mengenai pengurusan perizinan, pengembangan sumber daya manusia, dan pemasaran hasil produksi, di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kota Palembang yang berkerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM yang dikemas secara menarik pada sebuah *website*.

Penyediaan informasi melalui *website* masyarakat tidak lagi merasa sulit untuk memperoleh informasi terkait dengan perkembangan dunia usaha yang

dimilikinya. Selain itu masyarakat mampu memasarkan produknya melalui media sosial yang lebih luas menjangkau lapisan masyarakat. Adapun alamat yang disediakan Pemerintah kota Palembang yang bisa dikunjungi adalah <https://hallo.palembang.go.id> dan <https://lapor.go.id>.

Selanjutnya dengan adanya pusat konsultasi dan pengembangan UMKM akan memudahkan pemerintah menampung semua aspirasi dari masyarakat. Pusat konsultasi juga berguna untuk mengetahui letak kekurangan yang harus diubah dan pemerintah akan lebih memahami apa yang akan menjadi kebutuhan masyarakat selama ini. Sayangnya pusat konsultasi yang ada tidak banyak pengunjung yang mendatangi.

Pemerintah telah menyediakan fasilitas yaitu dengan mendirikan perkumpulan melalui MUSRENBANG dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Selain memperoleh aspirasi dari masyarakat, juga dapat memilih kegiatan secara prioritas sesuai dengan potensi kondisi wilayah per-kecamatan.

Pengembangan UMKM dapat dilihat dengan adanya bantuan pelatihan dan pembinaan yang diberikan dengan mendatangkan pelatih sebagai instruktur pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh suatu UKM.

Selanjutnya peran Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang melakukan pembinaan yang berupa Pemberian Modal dan pemasaran, hal ini berguna untuk menunjang kemudahan selama mereka memproduksi dan memasarkan hasil produksinya.

Salah satu strategi yang dilakukan dalam sistem pemasaran yaitu penciptaan peluang-peluang pasar bagi UKM yang ada di Kota Palembang. Terdapatnya Forum dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) yang ada di Kota Palembang, ini menampung semua hasil produksi UKM di Kota Palembang. Selain itu tersedianya pemasaran bersama melalui Pameran Tingkat Lokal Dan Regional yang diadakan setahun sekali yaitu tepatnya pada hari jadi Kota Palembang dan hari jadi Provinsi Sumatera Selatan. Juga menjalin kerjasama dengan Dinas terkait di luar daerah sehingga mampu memberi peluang pasar yang lebih luas pada daerah lain

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Tersedianya informasi terpadu berupa penyediaan *website* dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, tetapi namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
2. Terdapatnya pusat konsultasi melalui perkumpulan MUSRENBANG dari tingkat Kelurahan sampai pada tingkat Kecamatan, namun masih belum efektif dalam memberikan informasi. Terdapatnya upaya pengembangan untuk UMKM melalui pembinaan dengan memberikan bantuan peralatan, pelatihan skill dan bantuan pemasaran hasil produksi UMKM.
3. Tersedianya sistem pemasaran tingkat local dengan menyediakan forum yang bernama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA), tingkat regional dengan mengikuti pasar

murah atau pameran dan tingkat nasional dengan melakukan kerja sama kepada Dinas Lain di luar daerah seperti mengikuti pameran di daerah tersebut.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Dibutuhkan adanya sosialisasi dalam penggunaan *website* penting untuk dilakukan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang kepada masyarakat luas.
2. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang menyediakan sendiri kantor khusus konsultasi.
3. Sistem pemasaran bersama terus dikembangkan.

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Baiquni, *Strategi Penghidupan di Masa Krisis: Belajar dari Desa*. Yogyakarta: Ideas Media, 2007.
- [2] I. dan M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BFEE - Yogyakarta, 2002.
- [3] Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- [4] Afiffuddin, *Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- [5] “<http://www.bps.go.id>.” .
- [6] “<http://www.koperasiukm.com>.” .
- [7] *Perwali Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja, Sekretariat Daerah Kota Palembang Dan Staf Ahli*. Palembang.
- [8] S. Andaryani, “Peranan PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) dalam Menyediakan Moda Transportasi di Kota Palembang,” *J. Pemerintah. dan Polit.*, vol. 3, no. 3, 2019.
- [9] “<https://www.Palembang.IDN>.” .
- [10] R. A. Aditama, *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi*. 2020.
- [11] Sarinah dan Mardalena, *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- [12] Fred R David, *Strategic Management: Manajemen Strategis*. JAKARTA: Salemba Empat, 2006.
- [13] M. Kuncoro, *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. JAKARTA: ERLANGGA, 2005.
- [14] D. P. Lestari, “COMMUNICATION FACTORS IN IMPLEMENTING THE POLICY OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL REVITALIZATION IN SOUTH SUMATERA PROVINCE,” *Manag. Entrep. Trends Dev.*, vol. 4 NO. 18, pp. 48–58, 2021, doi: <https://doi.org/10.26661/2522-1566/2021-4/14-05>.
- [15] Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan-konsep, Dimensi, dan Strateginya*. JAKARTA: PT Bumi Aksara, 2009.
- [16] S. Andaryani, *Penyelesaian Surat Keberatan Atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Studi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Bagian Penerimaan dan Keberatan Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- [17] S. Andaryani, *Persepsi dan Harapan Masyarakat Atas Kualitas Pelayanan Di Kantor SAMSAT Kota Palembang*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- [18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R7D*.

- Bandung: Alfabeta, 2010.
- [19] Milles B dan Huberman, *Analisa Data Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992.
- [20] D. P. Lestari, E. Larasati, Sundarso, and I. H. Dwimawanti, "Influencing Factors of Vocational High School Revitalization Policy Implementation," in *Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Public and Business Administration (AICoBPA 2020)*, 2021, vol. 191, doi: 10.2991/aebmr.k.210928.096.